

Analisis Penurunan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dari Sektor Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2007-2010

Oleh :

Dodit Lapudira

Hery Suryadi S.Sos M.Si

Diralapudira@gmail.com

085365100908

ABSTRACT

Pursuant to Code Number 32 year 2004 about monetary counter balance of central government and area, giving kewenangan which progressively wide to area for the memberdayajan of x'self, especially relate to management of financing source had. One of [the] important aspect of execution of area otomi and decentralization which must be arranged well the problem of management of Earnings Of Genuiness Area (PAD) representing mirroring of economic potency of area. To this in moderation if central government make Earnings Of Genuiness Area (PAD) as especial criterion in pemberiaan of area autonomy. To realize area autonomy and wide [of] decentralization, reality and hold responsible to be needed bymonetary management of area economically is, efficient, effective, transparent, and akuntabel.

Starting By Law Of Number : 1 year 2012 about public service retribution which given by government to importance of society, this matter represent realization development of state. There is even also form released by policy Government Of Sub-Province of Indragiri Pate;Upstream one of them is to policy By Law Of Number : 1 year 2012 about public service retribution, where in the By Law there are section arranging about Retribution Service of Market covering Retribution background, kiosk, managed by kiosk is Local Government, and appropriate to merchant.

Target of this research is to analyse degradation of Earnings of Genuiness Area sub-province of Indragiri Pate;Upstream Sector Service of Retribution Market and explain factors any kind of causing the happening of degradation of Earnings of Genuiness sub-province area of Indragiri Pate;Upstream of retribution sector service of market, where becoming informan key in this research is Kabid area management of market, Kasi earnings of area management of market, Commission of B DPRD Sub-Province of Indragiri Pate;Upstream, Expert collect. In conducting data collecting obtained from circumstantial interview and documentations to informan. After data gathered is later;then analysed by using descriptive analysis qualitative.

After done by research, analasis happened him degradation of Earnings of Area genuiness of market retribution sector [is] the lack of [done observation On duty Industry, Commerce and Management Of Market Sub-Province of Indragiri Pate Upstream to field aparatur very observation inexistence and minim done by DPRD Sub-Province of Indragiri Pate Upstream to related/relevant on duty and found by some factor becoming cause go down him of PAD of sector service of this market that is, factor of SDM, Observation factor, problem of Financing and factor awareness of merchant as retribution is obliged to market.

Keyword : Performance, Observation, Awareness of taxpayer

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah, memberikan kewenangan yang semakin luas kepada daerah untuk memberdayakan diri, terutama berkaitan dengan pengelolaan sumber pendanaan yang dimiliki. Salah satu aspek penting dari pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi yang harus diatur secara baik adalah masalah pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan pencerminan dari potensi ekonomi daerah. Untuk ini tidak berlebihan apabila pemerintah pusat menjadikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai kriteria utama dalam pemberian otonomi daerah. Untuk mewujudkan otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan manajemen keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

Bertitik tolak pada Peraturan Daerah Nomor : 1 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum yang diberikan pemerintah terhadap kepentingan masyarakat, hal ini merupakan realisasi pembangunan negara. Ada pun bentuk kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu salah satunya adalah kebijakan Peraturan Daerah Nomor : 1 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum, dimana didalam Peraturan Daerah tersebut terdapat pasal yang mengatur tentang Retribusi Pelayanan Pasar yang meliputi Retribusi pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

Dengan demikian untuk melihat realisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar pada dasarnya dapat diterima pada 14 kecamatan yang ada diwilayah Kabupaten Indragiri Hulu. Seluruh wilayah kecamatan memiliki potensi pungutan retribusi pasar yang cukup besar, akan tetapi realisasinya belum mencapai target yang telah ditetapkan. Dinas Pelayanan dan Pengelolaan Pasar dalam mengelola retribusi pelayanan pasar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 1 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum pada setiap wilayah kecamatan. Untuk lebih jelasnya nama dari 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu yaitu Kecamatan Rengat, Rengat Barat, Seberida, Batang Gangsal, Batang Cenaku, Peranap, Kelayang, Batang Peranap, Sungai Lala, Lirik, Pasir Penyau, Rakit Kulim, Lubuk Batu Jaya, dan Kuala Cenaku. Ada pun penelitian yang dilakukan ini pada pasar yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu.

Tabel 1.1
Jumlah Pendapatan Asli daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2007-2010 dari Sektor Retribusi Pelayanan Pasar

No	Tahun	Jumlah Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Retribusi Pelayanan Pasar
1	2007	Rp. 190.400.000,-00
2	2008	Rp. 180.565,000,-00
3	2009	Rp. 174.330.000,-00
4	2010	Rp. 141.820.000,-00

Sumber : Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Indragiri Hulu, 2012

Dari tabel diatas jumlah penerimaan retribusi pelayanan pasar dari tahun 2007-2010 mengalami penurunan setiap tahunnya dengan objek wajib retribusinya yaitu, seperti toko/ruko, kios, los, dan emperan. Penurunan Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi pasar tersebut mengalami penurunan yang sangat drastis, penurunan tersebut mencapai Rp. 10.000.000 pertahunnya.

Berdasarkan keterangan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat judul yaitu : "Analisis penurunan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dari sektor retribusi pelayanan pasar tahun 2007-2010".

B. Kerangka Teoritis

Menurut **Djoko widodo** (2007:80) kinerja biasanya merupakan isu penting karena dapat digunakan sebagai indikator keberhasilan organisasi dalam mencapai misi dan tujuan besarnya. Dari segi defenisi, penilaian kinerja merupakan suatu sistem yang digunakan oleh organiasi untuk menilai hasil pelaksanaan pekerjaan yang dicapai atau yang telah dilaksanakan oleh pegawai dari wewenang dan bebas tugas yang menjadi tanggung jawabnya, baik dalam arti kuantitas maupun kualitas yang dibandingkan dengan standar yang ditetapkan. Berkaitan dengan kinerja. Dengan kata lain organisasi dapat mengevaluasi kinerja dari para pegawai yang ada didalam struktur organisasi tersebut. Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Indragiri hulu harus ada indicator dalam penilaian terhadapap kinerja pegawai dalam hal realisasi pendapatan Asli daerah yang bersumber dari retribusi pelayanan pasar.

Menurut **Dharma S. S** (2004 : 21), pengawasan adalah usaha untuk mengawasi, membimbing dan membina gerak pegawai dan unit kerja untuk bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dengan berpedoman pada petunjuk baku dan pencapaian tujuan secafa efektif dan efisien. Pengawasan meliputi kegiatan penilaian atas hasil kerja yang telah dilakukan. Bila ditemukan tindakan atau akftitas yang menyimpang atau standar atau petunjuk baku yang telah ditetapkan, maka diperlukan suatu tindakan korektif sesuai dengan prosedur-prosedur dan ukuran yang telah ditetapkan.

Pengawasan dapat mengawasi, membimbing dan membina pegawai di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Indragiri hulu agar kinerja yang dilakukannya berjalan dengan efektif dan sesuai dengan yang telah direncanakan dan yang telah ditetapkan sehingga Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi pasar dapat tercapai sesuai dengan targetnya.

C. Masalah Penelitian

Dalam penelitian ini, masalah yang di teliti adalah sebagai berikut :

1. Mengapa turunnya Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dari sektor retribusi pelayanan pasar tahun 2007-2010 ?
2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan turunnya Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dari sektor retribusi pasar tahun 2007-2010 ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mengapa turunnya Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dari sektor retribusi pelayanan pasar tahun 2007-2010.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan turunnya Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dari sektor retribusi pasar tahun 2007-2010.

2. Kegunaan Penelitian

Setelah penelitian ini dilaksanakan dan mendapat suatu gambaran yang ada sesuai dengan data dilapangan, diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna bagi dunia akademis maupun dunia praktis. Adapun kegunaan dari penelitian ini secara khusus adalah :

1. Sebagai bahan informasi dan masukan bagi pihak kantor pengelolaan pasar Kabupaten Indragiri Hulu beserta jajarannya dalam menjalankan tugas dan pengambilan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah khususnya kantor pengelolaan pasar.
2. Sebagai penambahan pengalaman berharga bagi penulis dalam menginterpretasikan ilmu pengetahuan selama penelitian ini.
3. Untuk memberi koreksi dan motivasi bagi pihak-pihak yang berwenang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

METODE PENELITIAN

1. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara
yaitu melakukan tanya jawab secara langsung dengan informan penelitian untuk memperoleh data primer, yakni informasi-informasi dan keterangan-keterangan dari informan.
2. Dokumentasi
yaitu pengumpulan data dengan mengumpulkan data dari segala sumber data yang berhubungan dengan objek penelitian.

2. Jenis Data

1. Data Primer
Data yang diperoleh langsung dari informan penelitian, yang dilakukan melalui penelitian lapangan berupa informasi dari wawancara. Wawancara yang dilakukan dengan informan.
2. Data Sekunder
Data yang diperoleh dari dokumentasi-dokumentasi atau keterangan sumber-sumber lainnya yang dapat menunjang objek yang sedang diteliti.

3. Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dengan analisa kualitatif, jenis penelitian ini dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisa Turunnya Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Dari Sektor Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2007-2010

Reformasi total pada saat ini membawa pergeseran paradigma dari sistem pemerintah bercorak sentralistik mengarah kepada sistem pemerintahan desentralistik dengan mewujudkan otonomi daerah yang bertanggung jawab, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan kondisi dan potensi wilayahnya. Adapun gagasan dalam mewujudkan otonomisasi, bertitik tolak dari beberapa asumsi bahwa, undang-undang Dasar 1945 sebagai sumber utama kehidupan konstitusional harus dapat menjadi pendorong perkembangan perikehidupan berkonstitusional sebagai tatanan hidup yang terinternalisasi dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam rangka untuk membangun kehidupan tersebut, maka Undang-Undang Dasar 1945 harus bertumbuh kembang sesuai dengan dinamika masyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga kehidupan bermasyarakat mendapatkan jaminan berdasarkan hukum.

Dampak positif inilah yang melahirkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999. Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Lahirnya kedua Undang-Undang ini dipandang sangat penting, karena melalui pelaksanaan kedua Undang-Undang ini diharapkan akan membawa perubahan kepada kehidupan pemerintah daerah yang dapat diwujudkan dalam upaya mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya, dan dalam rangka upaya peningkatan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan.

1. Kinerja dan Pengawasan yang dilakukan Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Indragiri Hulu

Menurut **Djoko widodo** (2007:80) kinerja biasanya merupakan isu penting karena dapat digunakan sebagai indikator keberhasilan organisasi dalam mencapai misi dan tujuan besarnya. Dari segi defenisi, penilaian kinerja merupakan suatu sistem yang digunakan oleh organisasi untuk menilai hasil pelaksanaan pekerjaan yang dicapai atau yang telah dilaksanakan oleh pegawai dari wewenang dan bebas tugas yang menjadi tanggung jawabnya, baik dalam arti kuantitas maupun kualitas yang dibandingkan dengan standar yang ditetapkan. Berkaitan dengan kinerja. Dengan kata lain organisasi dapat mengevaluasi kinerja dari para pegawai yang ada didalam struktur organisasi tersebut. Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Indragiri hulu harus ada indicator dalam penilaian terhadap kinerja pegawai dalam hal realisasi pendapatan Asli daerah yang bersumber dari retribusi pelayanan pasar.

suatu organisasi yang baik dalam pencapaian yang telah ditetapkan, haruslah melalui suatu organisasi yang digerakkan oleh sekelompok orang sebagai pelaku dalam upaya

pencapaian tujuan organisasi yang bersangkutan, dimana kinerja adalah sebagai sumber daya aparatur pemerintah, oleh karena itu sumber daya pegawai tersebut hendaklah memiliki keahlian yang tinggi, bila sumber daya aparatur pemerintah memiliki kinerja yang baik, maka akan berdampak kepada kinerja pemerintah yang baik pula.

Kinerja memang merupakan salah satu indikator penting dalam pencapaian target suatu organisasi. Pada kasus Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Indragiri Hulu tidak bisa mencapai target pendapatan yang bersumber dari retribusi pelayanan pasar disebabkan rendahnya kinerja dari aparatur pada tingkat bawah, dalam hal ini juru pungut yang bertugas disetiap pasar pemerintah yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu, padahal idealnya seseorang yang digaji menggunakan uang rakyat atau APBD memiliki tanggung jawab dan integritas yang tinggi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya untuk mendukung kebijakan dari pemerintah atau organisasi dimana tempat dia bernaung dalam mencapai target-target yang telah ditentukan.

2. Pengawasan yang dilakukan Oleh DPRD Terhadap Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Indragiri Hulu

Menurut **Dharma S. S** (2004 : 21), pengawasan adalah usaha untuk mengawasi, membimbing dan membina gerak pegawai dan unit kerja untuk bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dengan berpedoman pada petunjuk baku dan pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Pengawasan meliputi kegiatan penilaian atas hasil kerja yang telah dilakukan. Bila ditemukan tindakan atau aktifitas yang menyimpang atau standar atau petunjuk baku yang telah ditetapkan, maka diperlukan suatu tindakan korektif sesuai dengan prosedur-prosedur dan ukuran yang telah ditetapkan. Pengawasan dapat mengawasi, membimbing dan membina pegawai di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Indragiri hulu agar kinerja yang dilakukannya berjalan dengan efektif dan sesuai dengan yang telah direncanakan dan yang telah ditetapkan sehingga Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi pasar dapat tercapai sesuai dengan targetnya.

Permasalahan yang timbul selanjutnya adalah juru pungut sering terlambat menyerahkan laporan hasil retribusi pasar yang seharusnya laporan tersebut di serahkan kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar kabupaten Indragiri hulu setiap hari setelah juru pungut melaksanakan pemungutan terhadap semua wajib retribusi namun terkadang juru pungut menyerahkan laporan hasil retribusi pasar kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar dua sampai tiga hari sekali, Keterlambatan ini rentan terjadinya penyelewengan hasil retribusi pasar yang dilakukan oleh juru pungut.

Hal diatas menunjukkan bagaimana lemahnya pengawasan yang di lakukan oleh DPRD sendiri, pengawasan yang harusnya dapat mengendalikan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Indragiri Hulu atau pun meminimalisir turunnya Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi pasar yang dilakukan aparatur yang ada dilapangan, maka DPRD selaku Lembaga Negara yang ada di daerahlah yang lebih memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap permasalahan ini, tidak heran banyak aparatur dilapangan tidak bekerja sesuai dengan yang seharusnya. Idealnya memang pengawasan yang di lakukan DPRD ini lebih aktif, rajin turun kelapangan dan secara berkesinambungan melaksanakan *Hearing*.

Kemudian LSM-LSM yang ada harusnya juga pro aktif terhadap permasalahan penurunan Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi pasar ini, jangan hanya aktif membuat laporan ketika ada proyek-proyek besar pembangunan pemerintah saja yang anggarannya besar,

sehingga nantinya dapat mempermudah kerja dari instansi terkait maupun DPRD sendiri dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, dengan adanya laporan yang masuk dari LSM maupun masyarakat sendiri tentunya akan mempermudah kerja dari instansi terkait maupun DPRD untuk melakukan pengawasan karena telah memiliki bahan dan data untuk di bahas terlebih dahulu. Fungsi pengawasan ini akan berjalan optimal jika adanya dukungan dari berbagai kelompok-kelompok yang berkepentingan termasuk masyarakat sehingga hasilnya pun dapat maksimal. Karena memang akan lebih baik jika dilaksanakan secara bersama-sama.

Dalam melaksanakan pengawasan DPRD tentunya juga melakukan dengan SKPD terkait dalam hal ini Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Indragiri Hulu selaku mitra kerja Komisi B Kabupaten Indragiri Hulu. Dalam hal ini DPRD tentunya memanggil Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Indragiri Hulu untuk melaksanakan rapat dengar pendapat (*Hearing*).

Lemahnya koordinasi dari kedua lembaga tersebut dalam mengawasi permasalahan penurunan Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi pasar ini, terkesan saling menyalahkan satu sama lainnya. Harusnya terjadi sinkronisasi dari kedua lembaga ini dalam melaksanakan pengawasan terhadap permasalahan ini. Dengan adanya sinkronisasi terkait fungsi pengawasan ini tentunya akan memaksimalkan pengawasan yang dilakukan kedua lembaga ini. Kemudian perlu adanya saling dukung antara kedua lembaga ini dalam pelaksanaan fungsi pengawasannya, misalkan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar harus membentuk tim khusus untuk langsung turun kelapangan dan anggaran dana untuk Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar untuk melaksanakan pengawasan harus segera dianggarkan oleh DPRD, sehingga dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya tidak menggunakan dana pribadi lagi.

Kemudian perlu adanya komunikasi yang intens antara kedua lembaga ini dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, ketika hal ini sudah dilakukan tentu akan terciptanya penguatan dan terciptanya suasana yang harmonis serta terjadinya penyamaan persepsi dalam melakukan pengawasan permasalahan penurunan Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi pasar yang implikasinya tentu menguntungkan Pemerintah Daerah dalam hal meningkatkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

B. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Turunnya Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dari Sektor Retribusi Pasar Tahun 2007-2010

Adapun faktor yang menyebabkan turunnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi pasar pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Indragiri Hulu adalah :

1. Dalam Pelaksanaan Penyuluhan, faktor penghambat terbesar adalah faktor SDM. Karena rata-rata juru pungut hanya tamatan Sekolah Menengah Atas, sehingga dalam meminta pungutan sering terjadi perdebatan antara juru pungut dan pedagang karena juru pungut tidak bisa menjelaskan secara rinci kepada pedagang tentang arti pentingnya membayar retribusi dan pedagang pun bersikap acuh tak acuh dalam membayar retribusi tersebut, ditambah lagi dengan pelaksanaan penyuluhan kepada pedagang masih dinilai masih minim, keran dapat dilihat bahwa pedagang masih banyak yang tidak memiliki kesadaran sendiri untuk membayar retribusi.

2. Dalam pelaksanaan pengawasan, faktor penghambatnya adalah tidak adanya personil yang ditugaskan untuk mengontrol pelaksanaan pemungutan retribusi yang dilakukan oleh juru pungut dilapangan. Sehingga hal ini sering tidak tercapainya target retribusi karena banyak petugas pemungut yang tidak menyetorkan dana tersebut ke kas daerah. Sedangkan terhadap

pedagang, kendala yang dihadapi yaitu kurangnya kesadaran pedagang terhadap kewajibannya membayar retribusi pasar sehingga juru pungut retribusi pasar sulit untuk mengambil retribusi kepada pedagang tersebut.

3. Masalah pendanaan, faktor keuangan atau pendanaan ini penting demi suksesnya kegiatan pengawasan, karena seperti yang dikatakan Kaho (1998 : 60), menyangkut sumber-sumber pendapatan, dengan jumlah uang yang cukup dan pengelolaan yang sesuai dengan tujuan serta peraturan yang berlaku. Faktor keuangan ini penting, karena hampir tidak ada kegiatan pemerintahan yang dapat dilakukan tanpa dukungan keuangan. Realitas menunjukkan bahwa, semakin banyak uang yang tersedia, semakin banyak kemungkinan pekerjaan yang dapat dilakukan. Demikian pula semakin baik pengelolaannya, semakin berdaya guna pula pemakaian uang tersebut. Pengawasan terhadap permasalahan penurunan Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi pasar ini juga terkendala masalah keuangan. Padahal dalam keputusan Bupati dikatakan segala pembiayaan yang ditimbulkan itu di bebankan kepada APBD kabupaten Indragiri Hulu.

Hal ini menunjukkan bahwa memang masih belum dianggarkannya secara tertulis di APBD terkait pengawasan ini, tentunya dengan fakta tersebut tidak memungkinkan pengawasan yang dilakukan akan berjalan maksimal karena keterbatasan mengenai permasalahan anggaran tersebut. Dari hal ini tentu susah sekali diharapkan hasil pengawasan tersebut akan maksimal dan menyentuh akar permasalahan tersebut karena kekurangan di segi pendanaan ini.

4. Masalah kesadaran pedagang, dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari retribusi pasar juga menemui berbagai macam kendala, salah satunya adalah faktor rendahnya kesadaran pedagang untuk membayar retribusi pasar sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan padahal fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk menunjang kegiatan pedagang sudah cukup baik dapat dilihat dari semakin meningkatnya jumlah pasar yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya dapat dibuat kesimpulan bahwa:

1. Penurunan Pendapatan Asli daerah Kabupaten Indragiri Hulu dari sektor retribusi pasar karena pengawasan yang dilakukan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Indragiri Hulu tidak maksimal dilakukan sehingga berimbas pula terhadap kinerja dari aparatur yang ada dilapangan yang bertugas untuk melakukan pungutan terhadap retribusi pasar, kemudian ditambah lagi pengawasan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu tidak dilakukan sama sekali yang mengakibatkan kecurangan yang ada dilapangan tidak termonitor dan tidak dapat dievaluasi.
2. Penurunan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dari sektor retribusi pasar disebabkan beberapa faktor, antara lain faktor penyuluhan, faktor pengawasan, faktor pendanaan dan faktor kesadaran pedagang.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah

Pemerintah daerah sebaiknya membentuk sebuah tim yang secara khusus menangani permasalahan retribusi pasar ini yang nantinya bisa melakukan pengawasan, evaluasi dan memberikan masukan kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pengelolaan Pasar kabupaten Indragiri Hulu untuk memprosesnya dan membuat kebijakan untuk menangani permasalahan retribusi pasar ini.

2. Bagi Pedagang

Harus tumbuh kesadaran dari pedagang yang berada di pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu untuk turut aktif mendukung kebijakan pemerintah mengenai pemasukan dari sektor retribusi pasar Karena Pemerintah Daerah telah menyediakan tempat yang layak dan bagus bagi para pedagang untuk menunjang aktifitas perdagangannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Djoko Widodo, 2007, *Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja*. Malang : Bayu Medika
- Sedarmayanti, 2000, *Good Governance*. Bandung : Mandar Maju
- Agus Dwiyanto, 1995, *Penilaian Kinerja Organisasi Publik*, Yogyakarta : Universitas Gajah Mada
- Basuki, 2002, *Manajemen Pelayanan Umum*. Yogyakarta : Gunung Agung
- Keban, 2004, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*, Yogyakarta : Gava Media